

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Regionalisme dalam Hubungan Internasional memiliki berbagai macam definisi. Edward D. Mansfield¹ dan Helen V. Milner² membagi regionalisme menjadi dua jenis. Pertama, regionalisme yang berdasarkan kedekatan geografis yang dapat diartikan sebagai adanya koordinasi atau kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik oleh negara – negara yang secara geografis berdekatan. Kedua, berdasarkan faktor non-geografis yang dapat diartikan sebagai aktivitas government dan non-government. Kegiatannya berupa peningkatan level ekonomi dan aktivitas politik di antara negara - negara yang tidak berdekatan secara geografis.³

Uni Eropa (UE) adalah salah satu contoh regionalisme yang tergolong ke dalam jenis regionalisme berdasarkan kedekatan geografis. Uni Eropa (*European Union*) adalah sebuah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang terdiri dari beberapa negara Eropa. Dengan bergabungnya Kroasia pada tanggal 1 Juli 2013, negara anggota Uni Eropa sekarang berjumlah 28 negara.⁴ Berbeda dengan regionalisme lainnya di dunia, Uni Eropa dianggap sebagai sebuah regionalisme

¹ Edward D. Mansfield adalah seorang professor sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Pennsylvania 2001 – sekarang.

² Helen V. Milner adalah seorang Profesor Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Princeton. Dia adalah ketua Departemen Politik dari tahun 2005 sampai 2011. Dia adalah presiden dari Asosiasi Internasional Ilmu Politik (IPSA) 2012-2014. Dia telah banyak menulis tentang isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi politik internasional dan komparatif, hubungan antara politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri, globalisasi dan regionalisme, dan hubungan antara demokrasi dan kebijakan perdagangan.

³ Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner, “International Organization,” *New Wave Regionalism* 53 (1999) : 589 – 627.

⁴ European Union, *History of EU*, <http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/>, diakses tanggal 14 Februari 2015.

yang lebih terintegrasi karena memiliki berbagai atribut yang dimiliki oleh negara-negara merdeka seperti bendera, lagu kebangsaan, tanggal pembentukan, mata uang sendiri, kebijakan luar negeri maupun kebijakan keamanan yang ditransaksikan dengan negara-negara lain.⁵ Maka dari itu Uni Eropa berpotensi menjadi contoh bagi berbagai macam integrasi regional lainnya di dunia internasional. Hal ini dibuktikan juga dengan beberapa pencapaian yang telah diraih oleh Uni Eropa. Salah satunya adalah nobel perdamaian yang didapatkan Uni Eropa pada tahun 2012.⁶ Thorbjørn Jagland, Presiden Komite Nobel mengatakan “Uni Eropa selama lebih dari enam dasawarsa berperan besar dalam mewujudkan perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi, dan hak asasi manusia”. Hadiah Nobel Perdamaian ini dianggap sebagai dorongan moral bagi Uni Eropa dalam mengatasi krisis utang. Panitia Nobel memuji Uni Eropa, organisasi yang sekarang beranggotakan 28 negara, dalam membangun kembali kawasan setelah Perang Dunia Kedua.⁷

Penghargaan terhadap Uni Eropa tersebut juga mendapat sorotan dalam sebuah Seminar Uni Eropa dan *Indonesian Council of World Affairs* (ICWA) yang membahas Peranan Organisasi Kawasan dalam Mendukung Perdamaian diadakan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2012, Duta Besar Julian Wilson, Kepala Delegasi UE untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN mengatakan,

“Bagi UE, Hadiah Nobel Perdamaian sungguh merupakan suatu kehormatan. Ini pengakuan yang sangat berarti terhadap tekad

⁵ European Union, *Basic Information*, http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_en.htm, (diakses tanggal 8 Agustus 2014).

⁶ “Uni Eropa Raih Nobel Perdamaian”, *BBC*, 12 Oktober 2012, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121012> (diakses tanggal 23 November 2013).

⁷ *Ibid.*

*politik dibalik persatuan kami, khususnya terhadap upaya unik Negara-negara Eropa untuk mengatasi perang dan kondisi terpecah-belah dan secara bersama membentuk benua yang damai dan sejahtera”.*⁸

Akan tetapi pencapaian – pencapaian tersebut belum bisa membuat Uni Eropa menjadi sebuah regionalisme yang sempurna. Dinamika di Uni Eropa mengalami pasang surut, berbagai permasalahan muncul, baik dari luar maupun dari dalam tubuh Uni Eropa itu sendiri. Penghargaan yang diraih Uni Eropa pada tahun 2012, tidak berarti bisa membuktikan bahwa Uni Eropa berhasil secara ekonomi. Krisis utang yang diawali oleh negara Yunani pada tahun 2008 menyebar ke negara anggota Uni Eropa lainnya seperti Irlandia, dan Portugal. Krisis ekonomi ini membuat Eropa memasuki fase – fase sulit. Kondisi perekonomian negara – negara di kawasan Eropa mendapat tekanan yang berat terutama dari sektor keuangan pemerintah yaitu berupa defisit anggaran yang relatif melebar dan beban hutang yang meningkat.⁹

Krisis keuangan yang dialami Yunani beserta beberapa negara lapisan pertama memiliki kemungkinan akan semakin dalam dan dapat menjalar menjadi krisis keuangan seluruh Eropa maupun global. Hal tersebut terlihat dari kemungkinan gagal bayar (*default*) negara – negara Eropa terutama lapisan pertama. Jika Yunani *default*, maka dampak negatifnya akan dirasakan langsung oleh banyak negara khususnya negara anggota Uni Eropa.¹⁰

⁸ *Indonesian Council of World Affairs (ICWA)*, Siaran Pers: Perayaan nobel perdamaian 2012. Seminar Uni Eropa (UE) dan *Indonesian Council of World Affairs (ICWA)* membahas Peranan Organisasi Kawasan dalam Mendukung Perdamaian. Jakarta. 10 Desember 2012.

⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Krisis keuangan Eropa: Dampak terhadap perekonomian Indonesia* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011), 1.

¹⁰ *Ibid.*, 5.

Data dari *Bank for International Settlement* (BIS)¹¹ per Oktober 2011, yang dimuat oleh *The New York Times* pada 22 Oktober 2011, menyatakan bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh negara lapisan pertama di Uni Eropa meluas ke negara – negara lainnya di Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, Italia, dan Inggris. Tidak hanya ke negara Uni Eropa saja, dampaknya juga dirasakan oleh Amerika Serikat dan Jepang.¹²

Inggris adalah salah satu negara yang terkena dampak dari permasalahan tersebut. *Bank of England*¹³ (BOE) memperingatkan bahwa krisis ekonomi zona Eropa tersebut akan memberikan resiko pada sistem keuangan Inggris. Dalam Laporan Stabilitas Keuangan, dana bantuan pinjaman dari UE dan Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 750 miliar Euro (USD1 triliun) memang digunakan untuk stabilisasi pasar setelah terjadi guncangan akibat masalah utang Yunani. BOE mengatakan tekanan pasar masih berlanjut dan bisa memberikan efek negatif terhadap sistem keuangan Inggris.¹⁴

Beberapa permasalahan tersebut tentunya menciptakan ketidaknyamanan kepada pemerintah Inggris. Efek dari permasalahan ini semakin menyita perhatian dengan munculnya isu *British Exit (Brexit)* ke permukaan. *Brexit* adalah sebuah

¹¹ *The Bank for International Settlement* (BIS) adalah lembaga keuangan internasional tertua di dunia yang mulai beroperasi sejak 1930. Rekening BIS berasal dari Bank Federal New York yang menyoroti fungsi penting bank. Hampir semua bank-bank Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan Afrika Selatan, berpartisipasi di dalam atau berhubungan erat dengan aktivitas BIS. Kantor Pusat BIS berlokasi di Basle, Swiss.

¹² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 6 - 7.

¹³ *Bank of England* adalah bank sentral Inggris yang didirikan pada tahun 1694. Awalnya *Bank of England* adalah lembaga swasta, kemudian dinasionalisasi setelah perang dunia kedua. *Bank of England* memiliki misi untuk mempromosikan kebaikan rakyat Inggris dengan mempertahankan stabilitas moneter dan keuangan.

¹⁴ "Krisis Utang Eropa Bahayakan Inggris", *Okezone*, 25 Juni 2010, <http://economy.okezone.com/read/2010/06/25/213/346758/krisis-utang-Eropa-bahayakan-Inggris/large>, (diakses tanggal 10 Desember 2014).

fenomena ataupun isu yang muncul ke permukaan setelah pemerintah Inggris menyatakan keinginannya untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.¹⁵

Pada dasarnya isu *Brexit* ini bukan hal yang baru, Inggris senantiasa mengalami pro dan kontra mengenai isu integrasi Eropa. Perdebatan mengenai partisipasi Inggris di dalam integrasi Eropa sudah berlangsung sejak Uni Eropa masih bernama ECSC (*European Coal and Steel Community*). Beberapa fenomena yang terjadi di masa lalu menandai pro dan kontra integrasi Inggris dengan Uni Eropa. Pada tahun 1950, pemerintah Inggris yang pada saat itu dipimpin oleh Clement Attlee dari Partai Buruh diundang untuk ikut ambil bagian dalam perundingan ketika pembentukan ECSC masih diwacanakan, namun Attlee menolak tawaran tersebut karena merasa kerja sama ECSC akan bertolak belakang dengan prinsip nasionalisme yang dimiliki Inggris.¹⁶ Walaupun masih dalam situasi pro dan kontra, akhirnya pada tanggal 1 Januari 1973 Inggris secara resmi bergabung dengan ECSC (*European Coal and Steel Community*) yang lebih terintegrasi dan berganti nama menjadi EC (*European Community*).¹⁷

Pro dan kontra kembali terlihat setelah dua tahun Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Pada tahun 1975, Harold Wilson yang kembali menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan Edward Heath menyelenggarakan referendum. Referendum ini tidak saja menentukan lolos tidaknya langkah

¹⁵ Almut Moller dan Tim Oliver, *The United Kingdom and the European Union: What would a "Brexit" mean for the EU and other States around the world*, (Germany: The German Council on Foreign Realctions, 2014), 1.

¹⁶ Dexter Thillien, "In Or Out? The UK and The EU", *Global Politics*, 2008, <http://www.global-politics.co.uk/Issue%205/UK%20EU.htm>, (diakses tanggal 25 Juni 2012).

¹⁷ John W. Young, "Britain and the European Unity 1945-1999" (Houndmills: Macmillan Press, 2000), 106.

pembaharuan dalam syarat keanggotaan yang direncanakan oleh Wilson namun juga untuk menentukan keberlangsungan keanggotaan Inggris dalam EC.¹⁸

Keberhasilan Macmillan untuk merealisasikan kebijakan keanggotaan EEC / EC dan hasil referendum pada tahun 1975 ternyata bukan jalan akhir bagi Inggris untuk menjadi negara yang positif dalam pembentukan integrasi Eropa. Seiring berjalannya waktu, kontroversi keanggotaan Inggris di Uni Eropa tidak kunjung usai. Sejak akhir dekade 80-an, Margaret Thatcher memegang kursi Perdana Menteri Inggris. Thatcher berasal dari Partai Konservatif yang memiliki kerangka pemikiran *euroseptic* yang sangat kuat¹⁹. Mereka membanggakan Inggris sebagai *the one and only*, dan kawasan paling eksklusif di Eropa. Menurut Thatcher, Inggris tidak pantas tunduk pada sebuah peraturan Uni Eropa, karena Inggris sejak dulu merupakan sebuah negara yang bangga dengan menunjukkan secara terang-terangan rasa etnosentrismenya.²⁰

Periode pemerintahan Thatcher ditandai dengan meningkatnya isolasi politik Inggris dari Eropa. Bagi Thatcher kepentingan Inggris merupakan hal yang paling utama. Politik luar negeri Thatcher ditekankan pada tiga hal; pertama, memastikan Inggris tetap dihormati sebagai negara yang berkuasa dengan memiliki senjata nuklir dan kedudukan permanen dalam Dewan Keamanan PBB (DKPBB); kedua, aliansi yang erat dengan Amerika Serikat; dan ketiga, tidak memiliki keinginan untuk persatuan Eropa yang lebih dalam.²¹

¹⁸ Oliver Lewis, "Lessons from 1975 renegotiation" (Business for Britain: London, 2013), 17.

¹⁹ Chris Gifford, *Euroseptic Thatcherism* dalam *The Making of Euroseptic Britain: Identity and Economy in a Post-Imperial State*, (England: Ashgate Publishing, 2008), 83.

²⁰ *ibid.* hal. 87

²¹ Eric J. Evans, "Thatcher and Thatcherism" third edition (London: Routledge, 2013).

Kontroversi mengenai integrasi Inggris antara kubu pro dan kontra di negara tersebut berlanjut dan memuncak ketika UE mengajukan program pembentukan mata uang bersama (*single currency*) yang dibentuk melalui EMU (*Economic Monetary Union*). Kontroversi mengenai integrasi Eropa sebelumnya terbagi menjadi kelompok pro-Eropa dan anti-Eropa. Kelompok anti-Eropa tidak hanya melakukan kritik terhadap kebijakan UE namun juga mengajukan tuntutan untuk mengeluarkan Inggris dari keanggotaan UE. Kontroversi yang terjadi ketika EMU/*euro* muncul mendorong pembentukan kelompok baru. Kelompok ini secara tegas menolak syarat konvergensi yang ada di dalam EMU dan menolak pengadopsian *euro* untuk menggantikan poundsterling namun tidak memiliki keinginan untuk keluar dari keanggotaan UE.²²

Anthony Foster memisahkan kelompok kontra EMU/*euro* menjadi empat bagian; kelompok kontra dari partai atau nonpartai serta kelompok kontra yang anti-UE atau anti-EMU. Kontroversi mengenai *euro* melahirkan sejumlah kelompok partisan seperti *Pro Euro Conservative Party*, *Keep the Pound* dari partai Konservatif, dan *Labour Against the Euro Group*. Kelompok nonpartisan yang lahir dari kontroversi EMU/*euro* adalah *4sterling*, *Bussiness for Sterling*, *New Europe*, dan *the New Alliance*. Sejumlah kelompok lama seperti *Democracy Movement*, *European Movement*, dan *Britain in Europe* juga turut ambil bagian dalam perdebatan EMU/*euro*.²³

Kemudian di bawah pemerintahan John Major, Inggris menolak mengadopsi *euro* karena merosotnya kondisi ekonomi negara tersebut setelah

²² Anthony Forster, “*Eurocepticism in Contemporary British Politics: Opposition to Europe in the British Conservative and Labour Parties Since 1945*” (London: Routledge, 2002),107.

²³ Ibid, 12.

bergabung dengan ERM (*Exchange Rate Mechanism*). ERM adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk menstabilkan nilai tukar mata uang melalui pengaturan suku bunga. Meskipun penyebab merosotnya ekonomi lebih disebabkan oleh kesalahan pemerintah Inggris dalam memilih momentum untuk ikut serta dalam ERM, namun kegagalan ERM menjadi faktor yang memperkuat alasan kelompok kontra untuk mempengaruhi keputusan pemerintah menolak *euro*.²⁴

Pada bulan Juni 2014, majalah Jerman, *Der Spiegel*, mengutip Perdana Menteri Inggris David Cameron pada saat resesi pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa di Brussels, Belgia.²⁵ Cameron menyatakan bahwa Inggris tidak akan menjamin keanggotaannya di UE terkait dipilihnya mantan Perdana Menteri Luksemburg Jean-Claude Juncker menjadi Presiden Komisi Eropa. Di mata Cameron, Juncker dianggap condong ke gagasan Federasi Eropa. Hal ini diprediksi merusak harapan Cameron bahwa UE akan dipimpin reformis yang bisa memperbaiki hubungan UE dengan Inggris.²⁶ Dari kata “memperbaiki” yang dilontarkan oleh Cameron, terlihat bahwa adanya hubungan yang kurang harmonis antara Inggris dengan Uni Eropa.

Isu *British Exit* ini tidak sekedar isu *high politics* di Inggris, namun juga telah menyentuh lapisan *public issue*, terbukti dengan adanya survei yang berusaha memetakan opini publik terhadap isu *British Exit*. Pada akhir tahun 2012 lembaga Riset ICM (*Independent Communication and Marketing*)²⁷ melakukan

²⁴ Anthony Foster, 85 – 86.

²⁵ “Inggrisancam keluar dari Uni Eropa”, Kompas, <http://internasional.kompas.com>, (diakses tanggal 8 Agustus 2014)

²⁶ Ibid.

²⁷ ICM (*Independent Communication and Marketing*) adalah peneliti opini publik yang didirikan pada tahun 1989. ICM merupakan anak perusahaan dari *Creston Insight*, sebuah

sebuah survei yang bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat Inggris terkait keberlangsungan status keanggotaan negara tersebut di Uni Eropa. Hasil survei menghasilkan 51 persen responden ingin Inggris lepas dari Uni Eropa, dan 40 persen masih ingin bergabung. Lebih dari setengah warga Inggris siap berpisah dengan Uni Eropa.²⁸ Pada survei yang dilakukan oleh Ipsos MORI (*Market & Opinion Research International*)²⁹, 54 persen warga Inggris akan memilih untuk tetap menjadi bagian dari blok beranggotakan 28 negara itu, sementara 37 persen memilih keluar. Sementara pada November 2013 lalu, saat ditanya hal yang sama, 48 persen responden ingin Inggris keluar dari Uni Eropa dan hanya 44 persen yang memilih sebaliknya.³⁰

Puncaknya, pada 23 Januari 2013, dalam sebuah kutipan pidato David Cameron, Perdana Menteri Inggris ini menyatakan akan mengadakan referendum terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Cameron mengatakan,

*“...And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. To stay in the EU on these new terms, or come out altogether. It will be an in-out referendum..”*³¹

Cameron menjanjikan, referendum ini akan diadakan paling lambat pada akhir tahun 2017. Akan tetapi semua itu kandas setelah parlemen Inggris

perusahaan jasa pemasaran. Pada Juni 2014 menjadi anggota Dewan Polling Inggris. ICM melakukan penelitian pemungutan suara untuk publikasi media seperti *The Guardian*, *The Scotsman* dan *The Sunday Telegraph*.

²⁸“Survei Banyak Warga Inggris Ingin Keluar Dari Uni Eropa”, *Merdeka*, <http://www.merdeka.com/dunia/survei-banyak-warga-Inggris-ingin-keluar-dari-uni-Eropa.html>, (diakses tanggal 8 Agustus 2014).

²⁹ Ipsos MORI (*Market & Opinion Research International*) adalah sebuah organisasi riset pasar di Inggris. Dibentuk oleh dua perusahaan survei terkemuka di Inggris pada bulan Oktober 2005.

³⁰“Survei: Warga Inggris Masih Ingin Tetap di Eropa”, *Republika*, 16 Mei 2014, <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/14/05/16/n5no71-survei-warga-Inggris-masih-ingin-tetap-di-uni-Eropa>, (diakses tanggal 22 Mei 2015).

³¹ David Cameron, “Plans For A Referendum On British Membership Of The European Union”. London, 23 Januari 2013.

menyatakan bahwa koalisi pemenang, Liberal Demokrat telah memboikot perundangan tersebut.³² Kabar kegagalan tersebut rupanya tidak menghentikan upaya Cameron untuk tetap melakukan referendum apabila Ia memenangkan pemilu bulan Mei 2015. Cameron berjanji, jika Partai Konservatif yang dipimpinnya memenangi pemilu Inggris 2015, Ia akan menggelar referendum pada akhir 2017 untuk menentukan apakah Inggris bertahan atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa.³³ Setelah pemilu pada bulan Mei 2015 diadakan, akhirnya David Cameron menjabat kembali sebagai perdana menteri Inggris setelah partai konservatif yang dipimpin olehnya memenangi pemilu tersebut dengan jumlah suara 36,9 persen. Mengalahkan partai buruh yang dipimpin oleh Ed Miliband dengan jumlah suara 30,4 persen.³⁴

British Exit bukanlah sebuah fenomena yang muncul secara alami, akan tetapi ada faktor – faktor penyebab munculnya isu tersebut. Sejalan dengan asumsi konstruktivisme yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia internasional bukanlah sesuatu yang *given*, ada konstruksi dalam bentuk interaksi antara suatu agen dengan agen lain yang saling mempengaruhi. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh ide, karena konstruktivisme lebih mendahulukan aspek ideasional daripada material. Dalam kasus *British Exit*, peneliti menemukan sebuah ide yang dinamakan *euroscepticism*. *Euroscepticism*

³² “Janji Referendum David Cameron Kandas”, *CNN Indonesia*, 3 Oktober 2014, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/2014/10/30/14019-134-8799/janji-referendum-david-cameron-kandas/>, (diakses tanggal 11 Desember 2014).

³³ “Inggris Ancam Keluar dari Uni Eropa”, *Kompas*, 2 Juni 2014, <http://internasional.kompas.com/read/2014/06/02/1509298/Inggris.Ancam.Keluar.dari.Uni.Eropa> (diakses tanggal 20 November 2014) .

³⁴ “*Election 2015 Result*”, *BBC*, www.bbc.com, (diakses tanggal 23 Mei 2015).

memiliki sejarah yang panjang di Inggris, memiliki akar yang kuat, dan mempengaruhi setiap kebijakan Inggris terhadap Uni Eropa.³⁵

Secara historis, euroskeptis muncul di Inggris pada awal 1970an, ketika referendum terkait keanggotaan Inggris dalam *European Community* (EC) sedang marak diperbincangkan. Pada saat itu istilah *euroscepticism* belum tercipta, akan tetapi sifat skeptis terhadap integrasi Uni Eropa dihubungkan dengan sebuah kelompok yang bernama *anti-marketers*. *Anti-marketers* menolak segala bentuk partisipasi Inggris dalam program integrasi Eropa.³⁶

Istilah *euroscepticism* lahir dan muncul di Inggris pada tanggal 11 November 1985, dimuat dalam koran Inggris, *The Times*, untuk menggambarkan skeptisnya partai oposisi di Inggris terhadap EC dan kebijakannya.³⁷ Kemudian, pada 20 September 1988, Margaret Thatcher yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri Inggris, menunjukkan sikap skeptisnya terhadap EC yang tertuang dalam "*Bruges Speech*" yang populer pada saat itu. Sejak saat itu, *euroscepticism* terus tumbuh berkembang di Inggris dan menjalar ke beberapa negara Eropa.³⁸

Antonio Carlos Monterio, Sekretaris Jenderal Partai Populer di Portugal menjelaskan *euroscepticism* sebagai sebuah ekspresi politik yang cenderung untuk menggambarkan sikap politik yang menyalahkan Eropa untuk segala sesuatu yang

³⁵ Paul Taggart dan Alex Szczerbiak dalam Irina Kruhmalova, "*Analysis of British Relations With the European Union during the last four decades: Is Britain becoming increasingly eurosceptic? Will Britian Pull Out Of The European Union Eventually?*", Thesis, (Plzen: Zapadoeceska univerzita v Plzni, 2014), 7.

³⁶ Ibid

³⁷ Ariane Apocada, Information guide *Euroscepticism* (Cardiff University, 2013).

³⁸ Ibid.

tidak beres pada hari ini. Akan tetapi, apabila tidak setuju dengan segala sesuatu yang dibuat oleh Uni Eropa, belum tentu juga dikategorikan sebagai euroskeptis.³⁹

1.2 Rumusan Masalah

Sejak bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa (pada masa itu European Community) pada tahun 1973, banyak ketidakselarasan antara Inggris dengan kebijakan – kebijakan yang diterapkan Uni Eropa. Ketidakcocokan Inggris dengan Uni Eropa beserta beberapa negara anggota di dalamnya dapat terlihat sejak proses penetapan Inggris sebagai anggota tetap Uni Eropa. Hal ini diperparah dengan krisis ekonomi Eropa yang terjadi pada tahun 2008 yang pada akhirnya memunculkan sebuah ide/gagasan yang diberi istilah British Exit.

Gagasan tersebut meluas dan berkembang cepat di Inggris yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah wacana. Wacana tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam sebuah pidato pada awal tahun 2013 yang mengatakan akan mengadakan referendum mengenai kelanjutan keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Perdana Menteri David Cameron menjanjikan referendum ini akan diadakan paling lambat pada akhir tahun 2017. Sikap pro dan kontra terhadap keanggotaan Inggris di Uni Eropa mewarnai dinamika perpolitikan internal Inggris sejak sebelum bergabungnya Inggris dengan organisasi kawasan tersebut. Kondisi Inggris yang skeptis seringkali menjadi hambatan dalam setiap

³⁹ <http://www.euroviews.eu/2014/2014/05/02/Euroscepticism-an-ideology-a-feeling-or-a-political-attitude/> (diakses tanggal 1 April 2015).

kebijakan UE. Sikap skeptis dan pesimis terhadap UE dan segala kebijakannya terus berkembang menjadi sebuah ide yang disebut *eurosepticism* yang akhirnya mempengaruhi setiap kebijakan Inggris terhadap UE, salah satunya dengan mengkonstruksi wacana *British Exit*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, pertanyaan yang nantinya akan diangkat melalui penelitian ini yaitu:

“*Bagaimana eurosepticism mengkonstruksi lahirnya gagasan British Exit*”?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang *eurosepticism* dan *British Exit*.
2. Mendeskripsikan bagaimana *eurosepticism* mengkonstruksi kemunculan *British Exit*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara akademis dalam rangka menawarkan pengetahuan tentang *eurosepticism* dan *British Exit* dengan memakai teori konstruktivisme.

- b. Untuk masyarakat luas hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik negara Inggris terkait keanggotaannya dalam Uni Eropa di masa lalu dan masa sekarang.

1.6 Studi Pustaka

Ada beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi tersebut akan dijadikan referensi utama dalam penelitian ini. Antaranya adalah **Indra Kusumawardhana** dalam tulisannya yang berjudul *European Union in Crisis: Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam Krisis Ekonomi Uni Eropa*⁴⁰ menjelaskan krisis utang di kawasan Eropa telah membawa babak baru pada penanganan krisis. Krisis ini kembali memunculkan wacana mengenai eksistensi mata uang tunggal Eropa. Krisis yang bermula dari Yunani ini telah membawa hampir seluruh negara Uni Eropa pada krisis dan resesi. Selain itu, tulang punggung ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terhambat oleh krisis.⁴¹

Di tengah-tengah pertumbuhan integrasi ekonomi regional di Uni Eropa, institusi regional tidak memiliki kemampuan untuk menanggulangi krisis. Argumen utama pada studi ini adalah bahwa krisis ekonomi negara-negara Uni Eropa belum terselesaikan. Di sisi lain, kondisi integrasi ekonomi Uni Eropa mengalami peningkatan dan terdapat pula benturan kepentingan nasional antara negara anggota utama seperti Jerman, Perancis dan Inggris. Benturan berbasis

⁴⁰Indra Kusumawardhana, “*European Union in Crisis: Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam Krisis Ekonomi Uni Eropa*”, 6, no.1 (Jurnal Hubungan Internasional, 2013).

⁴¹ Ibid, 6.

kedaulatan mendorong pandangan yang dicetus oleh naiknya sentimen nasional dan membawa krisis ekonomi pada krisis politik dalam sejumlah negara anggota Uni Eropa.⁴²

Livio Stracca dalam tulisannya yang berjudul *The Global Effect of The Euro Debt Crisis*⁴³ fokus kepada efek global dari krisis hutang Eropa pada tahun 2010 – 2013. Stracca menganalisis dampak dari pengembalian modal, nilai tukar, dan obligasi di 12 negara maju dan 13 negara berkembang. Efek utama dari krisis utang ini adalah penurunan tingkat kembalinya modal, khususnya di sektor keuangan di negara – negara maju (tapi tidak di negara – negara berkembang). Secara statistik, efek yang ditimbulkan tidak signifikan terhadap beberapa negara, akan tetapi sangat signifikan terhadap negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Tulisan Stracca juga menganalisis saluran transmisi dengan melihat bagaimana pengaruh karakteristik negara pra-krisis terhadap arah dan kekuatan *spill-over*.⁴⁴

Dalam sebuah artikel karya **Kim Yongmin** “*History And Influence Of Euroscepticism In British Politics*”⁴⁵, dijelaskan bagaimana sejarah dan pengaruh *euroscepticism* dalam politik pemerintahan negara Inggris. Kim megawali ceritanya dengan memaparkan sedikit mengenai sebuah pidato Perdana Menteri David Cameron Inggris pada 23 Januari 2013 mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa. Poin penting dari pidato tersebut adalah sebuah janji dari Perdana Menteri Inggris itu untuk mengadakan referendum mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Referendum ini akan diadakan pada 2017 mendatang dengan syarat

⁴² Ibid.

⁴³ Livio Stracca, *The Global Effect of The Euro Debt Crisis* (European Central Bank, 2013).

⁴⁴ Ibid, 4.

⁴⁵ Kim Yongmin, “*History and Influence of Euroscepticism on British Politics*” (2013).

partai konservatif yang dipimpin oleh Cameron memenangi pemilu pada bulan Mei tahun 2015 ini. Latar belakang dari aksi politik ini tidak bisa dianggap remeh, khususnya *euroscepticism*. *Euroscepticism* punya tradisi yang panjang dan dukungan yang kuat di negara Inggris, serta memiliki pengaruh tertentu dalam perpolitikan di Inggris. *Euroscepticism* ini terancam berevolusi menjadi xenophobia dan mendorong peningkatan popularitas partai sayap kanan, termasuk UKIP (*United Kingdom Independence Party*).⁴⁶

Dalam tulisan Richard Whitaker dan Philip Lynch yang berjudul *Explaining Support for the UK Independence Party at the 2009 European Parliaments elections*⁴⁷, dijelaskan dukungan untuk *United Kingdom Independence Party* (UKIP)⁴⁸ pada pemilu pertama Eropa tahun 2009. Pada pemilu 2009 tersebut UKIP mencapai hasil baik dengan mengalahkan partai buruh. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa *euroscepticism* adalah faktor penjelas, akan tetapi masyarakat pemilih UKIP juga prihatin tentang imigrasi dan menunjukkan ketidakpuasan serta berkurangnya kepercayaan dalam sistem politik. Sebagai partai garis keras ‘*eurosceptic*’ yang berkomitmen untuk penarikan Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, UKIP telah menyadap sentimen *eurosceptic* dalam pemilihan Inggris dan memanfaatkan tidak populernya partai utama.⁴⁹

⁴⁶ Ibid, 3 – 5.

⁴⁷ Richard Whitaker dan Philip Lynch, “*Explaining Support for the UK Independence Party at the 2009 European Parliament Elections*” (University of Leicester, 2011).

⁴⁸ *United Kingdom Independence Party* (UKIP) adalah sebuah partai politik aliran sayap kanan dan Euroskeptik di Inggris. Didirikan pada tahun 1993 yang tujuan utamanya adalah agar Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa.

⁴⁹ Ibid, 2 – 6.

Kemudian dalam sebuah tulisan Catharina Sorensen yang berjudul *Danish And British Popular Euroscepticism Compared : A Sceptical Assessment of the concept*,⁵⁰ menguji persamaan dan perbedaaan sifat skeptis Denmark dan Inggris atau sifat negatif publik terhadap Uni Eropa. Permasalahan ini terlihat dengan mendenifisikan dan mengukur fenomena *populer euroscpeticism*, sebelum beralih kepada karakteristik khusus untuk negara – negara yang berkasus. Kesimpulan yang ditarik dari tulisan Sorensen ini adalah fenomena ini memiliki perbedaan signifikan antara kedua negara. Kesimpulannya, relevansi kontemporer mengenai isu *euroscepticism* mengacu pada meningkatnya penggunaan referendum sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah – masalah politik di Uni Eropa saat ini.⁵¹



⁵⁰ Catharina Sorensen, “*Danish And British Popular Euroscepticism Compared : A Sceptical Assessment of the concept*” (Copenhagen: Danish Institute of International Studies, 2004).

⁵¹ Ibid, 12.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Konstruktivisme

Penggunaan perspektif atau pendekatan dalam penelitian sangat penting sebagai pusat acuan atau pemandu dalam proses analisis. Penggunaan perspektif juga untuk menjaga ketepatan suatu penelitian ketika tujuan penelitian hendak dicapai.⁵² Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif konstruktivisme untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diajukan sebelumnya.

Konstruktivisme merupakan salah satu perspektif yang dikembangkan dan digunakan dalam studi sosiologi. Sejak abad ke delapan belas, tulisan tentang perspektif ini telah ditemukan. Giambattista Vico adalah salah satu ilmuwan yang memiliki kontribusi pada perkembangan konstruktivisme. Dalam studi Hubungan Internasional, konstruktivisme adalah sebuah perspektif yang ditransformasikan oleh para ilmuwan Hubungan Internasional sebagai alat analisis karena adanya ketidakpuasan sebagian para ilmuwan Hubungan Internasional dalam menerima penjelasan perspektif arus utama dalam studi HI.⁵³

Perspektif arus utama seperti realisme, liberalisme, strukturalisme dianggap oleh konstruktivisme terlalu mengagungkan – agungkan *power* sebagai dasar analisis, sehingga alih – alih berkontribusi pada terciptanya dunia damai, asumsi *power* yang terkandung dalam asumsi perspektif arus utama justru seringkali mempengaruhi tingkah laku para pelaku Hubungan Internasional untuk menjadi lebih agresif dan bersifat konfliktual. Dalam konteks ini maka para pemikir

⁵² Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 88.

⁵³ Sugiarto Pramono dan Andi Purwono, *Konstruktivisme Dalam Hubungan Internasional: Gagasan Dan Posisi Teoritik*, (Universitas Wahid Hasyim, 2010), 14.

konstruktivis seperti Friedrich Kratochwill (1989), Nicholas Onuf (1989), Alexander Wendt (1992), dan John Ruggie (1998) membuat terobosan besar dengan menggunakan kaca mata konstruktivisme untuk memahami realitas Hubungan Internasional.⁵⁴

Setidaknya terdapat tiga asumsi dasar dari perspektif konstruktivisme; pertama, setiap tindakan agen berdasarkan kepada ide dan identitas yang diperoleh dari hasil interaksinya dengan lingkungan sosial. Ide secara sederhana bisa dipahami sebagai bagaimana suatu agen memandang dan memaknai agen lain. Sehingga adanya ide mencerminkan identitas atau ciri dari agen tersebut yang membedakannya dengan agen yang lain. Konstruktivisme beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara (agen) akan berpengaruh terhadap bentuk sistem internasional. Sebaliknya, sistem internasional tersebut juga akan berpengaruh terhadap perilaku negara. Kedua, pandangan mengenai sistem internasional yang anarki. Dalam sistem anarki terdapat interaksi – interaksi antar-agen. Kemudian, dalam interaksi antaragen itu terjadi sebuah proses yang saling mempengaruhi antaragen sehingga interaksi tersebut memberikan bentuk terhadap sistem internasional. Hal ini bertentangan dengan paham realisme yang menyatakan bahwa realita Hubungan Internasional bersifat anarki yang mana anarki tersebut bersifat *given*. Ketiga, konstruktivisme memfokuskan kajiannya terhadap persoalan mengenai bagaimana pembentukan ide dan identitas.⁵⁵

Konsep konstruktivisme tentang struktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Wendt (1992), terdiri dari tiga komponen; pengetahuan bersama, sumberdaya material, dan praktik. Pengetahuan bersama merupakan dimensi

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Robert Jakson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations*, (New York: Oxford University Press Inc, 1999), 164 – 167.

pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi antara banyak aktor. Ia bersifat intersubjektif dan sangat dinamis. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor – aktor dalam bertindak laku. Sejalan dengan argumentasi tersebut Jennifer Sterling Folker menulis “*constructivism shows that even our most enduring institutions are based on collective understandings*”.⁵⁶

Sementara di sisi lain, sumber daya material merupakan fakta empirik yang lepas sama sekali dari pengetahuan kolektif tersebut. Bencana tsunami, ledakan gedung WTC sesaat setelah pesawat menabraknya, KBRI di malaysia, tentara, pekerja sipil, bangunan, kendaraan, perusahaan besar dengan saham dan aneka teknologinya, pusat perbelanjaan dan sebagainya tidak lebih dari sekedar materi yang tidak memiliki makna. Ketiga adalah praktik atau tingkah laku aktor yang sejatinya merupakan variabel yang dipengaruhi oleh konstruksi pengetahuan yang mereka bangun sendiri secara kolektif dan bersifat sangat dinamis.⁵⁷

Konstruktivisme melihat pada beragam dimensi yang bersifat konstruksi gagasan sebagai akibat interaksi antara para aktor, seperti wacana, opini, isu, nilai, identitas, norma, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan pandangan positivis yang memberikan penekanan kuat pada para pelaku dan aneka pola hubungan di antara mereka. Para teoritis konstruktivisme meyakini aneka konstruksi gagasan kolektif tersebut merupakan produk dari berbagai interaksi dari aktor – aktor dalam ranah empirik.⁵⁸ Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana ide *euroscpticism* muncul sebagai akibat interaksi antara Inggris

⁵⁶ Jennifer Sterling Folker, *Making Sense Of International Relations Theory*, (London: Lynne Publisher), 118.

⁵⁷ Sugiarto Pramono dan Andi Purwono, 15.

⁵⁸ *Ibid*, 16.

dengan sistem internasional (UE) yang pada akhirnya mengkonstruksi *British Exit*.

Bangunan gagasan tersebut bersifat sangat dinamis dan menjadi variabel yang berimplikasi pada cara aktor melihat diri dan lingkungannya. Pada konteks ini aktor – aktor dalam ranah Hubungan Internasional menentukan identitas, kepentingan dan akhirnya tindakan aktor tersebut. Konstruktivisme menjelaskan realita Hubungan Internasional yang sejatinya mereka anggap sebagai *share of ideas* dari para pelaku dalam ranah empiris dunia ini. Aktor – aktor dalam memilih tindakannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka namun oleh gagasan yang mereka bangun sendiri, karena sesungguhnya kepentingan pun bila ditarik kembali ke belakang akan sampai kepada sebuah gagasan.⁵⁹

A. Agen dan Struktur

Agen secara sederhana bisa dipahami sebagai aktor yang terlibat berinteraksi dalam sebuah struktur. Namun, struktur dalam konstruktivisme berbeda dengan struktur dalam teori strukturalis. Struktur dalam konstruktivisme diartikan sebagai lingkungan sosial. Interaksi agen dalam struktur sosial menyebabkan terjadinya dinamika sosial. Agen bisa berupa personal, lembaga, negara maupun institusi tertentu. Namun menurut Wendt, agen yang menjadi pusat dan memegang peranan sentral adalah negara, dengan kata lain negara adalah aktor utama dalam struktur sosial karena negara memiliki kekuatan secara institusi untuk merubah struktur sosial.⁶⁰

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Michelle Maiese, *Essay Social Structural Change*, (Boulder: University of Colorado, 2003), 2.

Struktur sosial adalah salah satu komponen penting konstruktivisme. Komponen ini merupakan lingkungan sosial di mana agen - agen bertindak satu sama lain secara intersubjektif. Pada struktur sosial inilah konstruktivisme Alexander Wendt melihat dinamika sosial dari suatu politik internasional.⁶¹

Dalam pandangan konstruktivisme, agen dan struktur terlibat dalam pemahaman intersubjektif, bukan hanya agen/subjek saja. Hal tersebut disebabkan oleh nilai, norma, bahasa, budaya dan ideologi merupakan fenomena sosial yang menciptakan identitas dan membimbing tindakan para agen. Namun dalam pemahaman intersubjektif perlu diingat bahwa intersubjektif tidaklah bersifat statis dari waktu ke waktu karena dipengaruhi oleh perubahan konteks. Misalnya, seseorang mencirikan kapitalisme kontemporer sebagai sebuah ideologi yang mencakup konsep uang berdasarkan nilai tukar bukan emas, dan legitimasi upah buruh bukan perbudakan. Namun, kapitalisme memanifestasikan dirinya berbeda dari waktu ke waktu. Perubahan konteks dalam intersubjektif ini juga dipengaruhi oleh interaksi di masa lalu yang menyebabkan suatu agen mampu berkuasa dalam struktur sosial. Contoh, penobatan AS dan Uni Soviet sebagai negara adidaya pada perang dingin karena menjadi agen utama dalam sistem internasional pada saat itu. Kondisi ini bisa dijadikan acuan dalam interaksi antaragen di masa berikutnya.⁶²

Struktur terbentuk melalui adanya interaksi antar-agen. Seperti halnya dalam kerja sama internasional, melalui praktek diplomasi, lembaga memenuhi fungsinya yang merefleksikan pemahaman bersama untuk menyediakan order,

⁶¹ Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Fifth edition (Oxford: Oxford University Press, 2013), 216.

⁶² Audie Klotz dan Cecelia Lynch, 7 – 11.

menstabilkan ekspektasi aktor, dan mengelola hubungan kekuasaan. Oleh karena itu, struktur dipandang sebagai sebuah media bagi agen - agen dalam mendistribusikan ide - ide (*ideas*) satu sama lain dan mendorong agen untuk menentukan nilai serta norma yang berlaku dalam struktur tersebut.⁶³

Jika rasionalis-positivis mendoktrinkan bahwa struktur internasional tidak lain merupakan distribusi kapabilitas material saja, konstruktivis meyakini sebaliknya bahwa struktur internasional adalah distribusi ide, dan agen – agen bertindak mengikuti pola persebaran ide tersebut. Struktur sosial yang dijelaskan oleh Alexander Wendt memiliki tiga elemen; pengetahuan bersama (*shared knowledge*), sumber daya material (*material resources*), dan tindakan – tindakan (*practices*). Struktur sosial ditentukan oleh adanya pemahaman, ekspektasi, atau pengetahuan bersama (*shared knowledge*). Hal tersebut yang dikatakan oleh Alexander Wendt membentuk hubungan antar aktor apakah bersifat kooperatif atau konfliktual.⁶⁴

B. Ide dan Identitas

Ide merupakan rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan terhadap suatu hal. Artinya pada interaksi dalam struktur sosial ide mengandung pemaknaan ataupun pandangan terhadap agen. Munculnya ide akan sejalan dengan munculnya identitas karena kemunculan identitas disebabkan oleh kesadaran diri akan perbedaan terhadap agen lain. Ide dibangun oleh nilai, norma, agama, ideologi serta *meanings* yang didapatkannya dalam lingkungan sosial. *Meanings* merupakan pemahaman yang muncul dalam melihat atau merespon

⁶³ Ibid, 26 – 27.

⁶⁴ Robert Jackson dan George Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, fifth edition (Oxford: Oxford University Press, 2013), 73.

interaksi antar dua agen yang berisikan simbol berupa perkataan, tingkah laku dan lain - lain di dalamnya. Dengan adanya ide, maka akan mempengaruhi *interest* dan *practice* agen dalam merespon lingkungan sekitarnya.⁶⁵

Alexander Wendt meyakini bahwa identitas dan kepentingan negara dipengaruhi oleh struktur yang ada. Identitas dan kepentingan tersebut tentunya akan mempengaruhi agen yang lain. Seperti dalam pemikiran Marxisme yang mengatakan bahwa negara didominasi oleh kaum borjuis, akan tetapi bagi konstruktivisme pada hakikatnya identitas mempengaruhi penempatan manusia ke dalam kelas tertentu, baik borjuis, proletar, dan lain – lain.⁶⁶

Identitas secara sosial akan menentukan jenis lingkungan anarki atau keamanan yang manakah yang akan berlaku. Seharusnya menurut Wendt, perlu ada penekanan pada format *collective identity*, di mana identitas tersebut secara kolektif tergantung pada bagaimana kepentingan itu didefinisikan. Serta berdasarkan atas masalah apa dan sejauh mana identitas sosial melibatkan sebuah identifikasi dengan kondisi akhir identitas lainnya.⁶⁷

Identitas kolektif merupakan identitas yang melekat pada kelompok dan didapat melalui proses interaksi dan adanya kesadaran tindakan dan tujuan bersama. Identitas kolektif menekankan tujuan positif dengan menjadikan yang lainnya juga sedemikian rupa sehingga mereka juga secara kognitif merupakan bagian dari diri tersebut dan kesejahteraan merupakan perhatiannya. Para aktor yang memiliki identitas kolektif menggambarkan kepentingan mereka atas

⁶⁵ Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Fifth edition (Oxford: Oxford University Press, 2013), 164 – 167.

⁶⁶ Audie Klotz dan Cecilia Lynch, 66.

⁶⁷ Barry Buzan dan Richard Little, *Constructivism and International Relation Alexander Wendt and His Critics* (New York: Routledge 2 Park Square, 2006), 57.

sebuah level agregasi yang lebih tinggi yang berdasarkan pada perasaan - perasaan atas solidaritas, komunitas dan loyalitas. Poin-poin tersebut tidak mengartikan bahwa kepentingan sendiri (*self-interested*) akan ditempatkan dalam satu kolektivitas melainkan kerja sama untuk menyamakan identitas aktor. Maka dalam pemahaman atas identitas, Wendt mengharuskan kita memfokuskan atas hubungan antara “apa yang dilakukan oleh para aktor” dan “siapakah mereka”.⁶⁸

C. Kepentingan dan Praktik

Identitas akan mempengaruhi interaksi antaragen yang diadopsi sebagai kepentingan yang bermuara pada rumusan kebijakan negara (*practice*). Pasca Perang Dunia II, konsep kepentingan kerap disejajarkan dengan *Power*. Di mana *Power* dimaknai sebagai *military capability* dan *interest* serta diartikan sebagai ego mutlak dari tujuan keamanan, kesejahteraan, dan kekuasaan. Konsep ini dikritik oleh Alexander Wendt yang mengatakan bahwa *interest* bukan merupakan produk dari kapasitas materi suatu negara yang bersifat absolut, melainkan sebuah konstruksi dari penyaringan ide yang terbentuk juga karena faktor identitas negara tersebut.⁶⁹

Dalam perspektif konstruktivisme bahwa praktik (*practice*) baik dalam bentuk kebijakan negara maupun tindakan agen dalam bentuk lain lahir dari *interest* akibat dari perbedaan identitas dan ide yang dibangun oleh nilai, norma, agama, ideologi dan sebagainya yang diyakini para agen yang juga didapatkan dalam interaksinya dalam struktur sosial yang dapat dilihat melalui *meanings*

⁶⁸ Ibid, 57.

⁶⁹ Ibid.

dalam interaksi antaragen yang mengandung simbol. Simbol tersebut antaranya adalah ungkapan – ungkapan yang disampaikan agen.⁷⁰

Wacana adalah sebuah *practice* berupa tindakan agen yang lahir dari sebuah *interest*. Dalam penelitian ini adalah Perdana Menteri Inggris, David Cameron sebagai representasi negara yang memunculkan wacana politik yaitu *British Exit*. Henrik Larsen dalam *European Journal of International Relations* dengan judul ‘*British and Danish European Policies in the 1990s : A Discourse Approach*’ mengatakan bahwa wacana politik sendiri dilihat sebagai sebuah fenomena intersubjektif.⁷¹

1.8 Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dalam menjawab pertanyaan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian konstruktivisme sebagai metodologi penelitian. Metodologi adalah prosedur yang dibutuhkan oleh seorang ilmuwan dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuat pengetahuan yang nantinya akan menjadi pegangan hidup para ilmuwan tidak datang begitu saja, akan tetapi diperoleh melalui serangkaian tahapan yang disebut sebagai prosedur.⁷² Banyak metodologi yang digunakan oleh para ilmuwan yang tentunya tidak bisa terlepas dari bagaimana seorang ilmuwan memandang dunia. Menurut Alexander Wendt,

⁷⁰ Audie Klotz dan Cecelia Lynch, *Strategies for Research in Constructivist IR*, (New York: M.E. Sharpe, 2007), 65.

⁷¹ Henrik Larsen, *British and Danish European Policies in the 1990s : A Discourse Approach*, “*European Journal of International Relations*” (University of Copenhagen: 1999), 454.

⁷² Umar Suryadi Bakri, “Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Tradisional dan Saintifik” dalam *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan paradigmatis dan Pendekatan Alternatif*, eds., Asrudin, Mirza Jaka Suryana, dan Musa Maliki (Malang: Intrans, 2014), 17.

konstruktivisme memiliki dua teori dalam melihat dunia; pertama, secara kausal dan kedua, secara konstitusi.

Dalam teori kausal, Wendt berupaya menjawab pertanyaan penelitian yang mengambil bentuk ‘kenapa?’ atau ‘bagaimana?’. Logika yang digunakan adalah sebab-akibat.⁷³ Sedangkan teori konstitutif memiliki tujuan untuk menjelaskan properti sesuatu. Pertanyaan – pertanyaan yang bisa dijawab dengan teori konstitutif biasanya mengambil bentuk ‘bagaimana mungkin?’ atau ‘apa?’. Fokus kepada bentuk pertanyaan ‘apa?’ Wendt mencontohkan beberapa seperti : ‘Apa jenis sistem politik Uni Eropa?’; atau ‘apa perilaku serbia selama ‘genosida’ perang saudara bosnia?’. Apa yang dicari oleh peneliti saat mengajukan pertanyaan semacam ini adalah berupa wawasan ke dalam apa yang direpresentasikan oleh beberapa fenomena, sedangkan teori kausal mempertanyakan kenapa fenomena itu dihadirkan.⁷⁴

Penelitian ini menggunakan cara berpikir kausal sehingga pertanyaan penelitian ‘bagaimana’ mendapatkan tempat untuk dijawab. Penelitian ini bermaksud mencari pengetahuan dan wawasan atas fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana *eurocepticism (idea)* dapat mengkonstruksi wacana *British Exit*.

1.8.1 Batasan Masalah

Objek utama dari penelitian ini adalah *eurocepticism* sebagai sebuah representasi ideasional yang mengkonstruksi wacana *British Exit*. Agar penelitian

⁷³ Alexander Wendt, “Tentang Konstitusi dan Kausasi dalam Hubungan Internasional” dalam *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*, eds., ., Asrudin, Mirza Jaka Suryana, dan Musa Maliki (Malang: Intrans, 2014), 185.

⁷⁴ Ibid, 186 -187.

ini tidak meluas dari rumusan masalah, maka peneliti membatasi penelitian ini dari tahun 2012 - 2016. Hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu tersebut terjadi dinamika kebijakan pemerintahan Inggris terhadap UE seiring dengan berkembangnya *eurocepticism* dalam lingkungan sosial Inggris yang mempengaruhi kebijakan negara tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengemukakan konstruksi ide atau nilai dalam struktur sosial Inggris dengan memberikan fakta – fakta dan informasi bagaimana ideologi *eurocepticism (ideas)* mempengaruhi setiap tindakan (*practice*) Inggris terhadap Uni Eropa, yang pada akhirnya mengkonstruksi sebuah wacana yang disebut sebagai *British Exit*.

1.8.2 Unit Analisa dan Tingkat Analisa

Unit analisa merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan.⁷⁵ Unit analisis dalam penelitian ini adalah *statecraft*. Tingkat analisa merupakan level di mana unit analisa akan dianalisis.⁷⁶ Tingkat analisisnya adalah Uni Eropa sebagai sebuah sistem internasional. Menurut wendt, negara dan sistem internasional tidak bisa dipisahkan seperti halnya manusia dengan masyarakat.⁷⁷

Alexander Wendt menjelaskan konstruktivisme yang negara sentris bukan berarti menghindarkan aktor – aktor non-negara, baik yang berada di tingkat domestik atau transnasional. Perang dan perdamaian tidak berhenti pada negara semata. Negara dianggap penting karena meskipun aktor – aktor non-negara dapat berperan sebagai penggagas perubahan, tetapi perubahan sistem internasional

⁷⁵ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 35.

⁷⁶ Ibid, 40 - 42.

⁷⁷ Wendt, *Social Theory*, 194.

terjadi hanya melalui negara sebagai medium.⁷⁸ Atas dasar hal tersebut, peneliti memahami bahwa sistem internasional tidak hanya terdiri dari negara – negara sebagai unit analisis, aktor – aktor non-negara juga memiliki arti penting yang dalam hal ini adalah individu – individu atau kelompok – kelompok kepentingan dengan ideologi *euroscepticism* yang berada di Inggris.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yakni data-data dan informasi yang secara keseluruhan diambil dari temuan-temuan yang dihasilkan pihak lain. Beberapa sumber tertulis yang digunakan seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta sebagai alat bukti. Selain itu juga digunakan data yang diperoleh melalui situs berita internasional dan surat kabar nasional.

1.8.4 Teknik Analisa

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atas objek secara logis dan sistematis. Data yang nantinya diperoleh dari berbagai sumber, akan diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, dan menyusunnya ke dalam pola dan memilih mana yang terpenting dan bisa menjawab permasalahan yang ada.⁷⁹

Berdasarkan jenis penelitian, maka pengolahan data akan dilakukan dengan interpretasi. Di dalam penelitian konstruktivisme peneliti dapat

⁷⁸ Ibid, 9.

⁷⁹ Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Techniques in Qualitative Research*, (State University of Georgia), 97.

menggunakan interpretasi yang diperlukan untuk membangun sebuah narasi historis sebagaimana metode penelitian dilakukan.⁸⁰

Dalam menyusun sebuah narasi historis ada tahapan atau hal penting yang mesti diperhatikan yang sekaligus menjadi cara bagi penulis untuk menganalisis data, tahapan atau hal penting tersebut adalah dengan menentukan perilaku peran (*the cast of characters*) dan membangun alur cerita (*storyline*). Menentukan perilaku peran berarti melihat hubungan aktor baik itu negara, kelas, gender, atau para pemimpin.⁸¹

Pada tahap teknik analisa ini akan dimulai dengan mengumpulkan data – data mengenai dinamika politik Inggris terhadap Uni Eropa. Kemudian mengumpulkan data – data yang berisi fakta bahwa adanya pertentangan - pertentangan pemerintah Inggris dengan kebijakan Uni Eropa. Penolakan – penolakan terhadap traktat yang sudah dirancang bersama. Setelah itu menjelaskan bagaimana proses interaksi antaragen dalam struktur sosial Inggris. Perdebatan yang terjadi antara kelompok pro-Eropa dengan anti-Eropa (*euroscepticism*) yang pada akhirnya mengkonstruksi wacana *British Exit*.



⁸⁰ Audie Klotz dan Cecelia Lynch, 46 – 48.

⁸¹ Audie Klotz dan Cecelia Lynch, 46 – 48.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I, Pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan penjelasan konteks – konteks pengetahuan yang sedang dipelajari. Deskripsi mengenai sejarah Uni Eropa dan deskripsi mengenai apa itu *British Exit* , bagaimana proses kemunculannya, dan bagaimana pro dan kontra wacana *British Exit* di dalam negeri Inggris sendiri.

BAB III, berisikan pembahasan tentang *eurocepticism* secara umum meliputi sejarah kemunculan *eurocepticism*, konseptualisasi *eurocepticism*, dan kemunculan *eurocepticism* di Inggris.

BAB IV, fokus pada isu yang diangkat, peneliti akan menganalisis konstruksi ide *eurocepticism* terhadap wacana *British Exit* sebagai bentuk *interest* dan *practice* dalam interaksi antar-agen.

BAB V, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang berdasarkan kepada pertanyaan penelitian yang diangkat.

